

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan pembangunan waduk Jatigede merupakan salah satu dari program pemerintah guna menjawab berbagai macam permasalahan yang ada. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah pusat di dalam pembangunan yaitu dengan dilakukannya pembangunan waduk. Dalam rangka pembangunan waduk tersebut, pemerintah telah mensosialisasikan berbagai keunggulan pembangunan waduk dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diadakannya kebijakan pembangunan waduk Jatigede diharapkan permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Suatu kebijakan yang dibuat pasti memiliki tujuan, dimana tujuan yang paling utama dari dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan Pasal 4 ayat 1 dan 2 : (1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. Dan ayat (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk menyediakan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 pasal 4 ayat (1) dan (2).

Gagasan pembangunan waduk Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963 oleh pemerintah, kemudian ditindak lanjuti dengan *Detail Design* (DED) pada tahun 1968 oleh konsultan *Small and Medium Enterprise Credit* (SMEC), Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh konsultan PT. Indra Karya JO serta PT. Wiratama dan telah mendapatkan sertifikat desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Ferbruari 2006.( Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jatigede, 2011 ).

Sebagai salah satu negara agraris yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah dimana sebagian besar penduduk indonesia bermata pencaharian sebagai petani seperti halnya pada Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting baik bagi sektor perekonomian maupun untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Wilayah Indonesia yang begitu beragam dan sumberdaya yang melimpah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pertanian.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan tersebut, pembangunan waduk Jatigede memberikan berbagai macam manfaat atau keunggulan yang akan didapat dari adanya pembangunan waduk tersebut. Salah satu manfaat yang akan didapat yaitu waduk Jatigede dapat digunakan untuk sarana irigasi yang diperuntukan untuk kepentingan sektor pertanian seperti halnya untuk mengairi lahan sawah pertanian masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Dirinci Per tahun**

Tahun	Teknis	Non Teknis
(1)	(2)	(3)
2012	-	1.609
2013	-	1.609
2014	-	1.594
2015	-	1.417

*(Sumber: UPTD Pertanian Tanaman Pangan, Potensi Desa diolah BPS)*

Dari data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luas sawah menurut jenis pengairan pada tahun 2014 dan 2015, penurunan tersebut terjadi karena dampak dari adanya pembangunan waduk tersebut. Lahan persawahan masyarakat merupakan lahan subur yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan bercocok tanam, berkurangnya lahan persawahan masyarakat yang disebabkan oleh tergesurnya lahan sawah akibat pembangunan waduk Jatigede secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya hasil produksi pertanian masyarakat. Dari hal tersebut seharusnya dengan adanya pembangunan waduk jatigede dapat membawa dampak positif atau memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi berkenaan dengan ketahanan pangan.

Adanya pembangunan waduk Jatigede membuat beberapa wilayah permukiman, perkebunan menjadi tergenang air terutama wilayah persawahan masyarakat, hal tersebut pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap hilangnya

mata pencaharian masyarakat. Dampak dari adanya perubahan lingkungan fisik yang mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu terjadi perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pembangunan waduk yang merupakan dampak lanjutan dari mata pencaharian masyarakat. Hal ini pula yang menyebabkan Tidak adanya kejelasan kegiatan masyarakat ketika hilangnya mata pencaharian yang disebabkan oleh pembangunan waduk Jatigede. Sehingga masyarakat merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat tidak adanya pekerjaan yang mereka miliki, mengingat lahan pertanian mereka tergenang air. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi lanjutan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari hilangnya lahan pertanian masyarakat. Daerah yang akan tergenangi bendungan Jatigede merupakan daerah pertanian karena didukung oleh luasnya wilayah pertanian dan juga keadaan geografis di mana merupakan daerah yang letaknya berada di sekitar hutan dengan potensi alam yang memadai bagi tumbuhnya sektor pertanian.

**Tabel 1.2**  
**Luas Daerah (ha) dan Persentase**  
**Menurut Kegunaannya 2012/2015**

Tahun	Luas (ha)	Persentase kegunaan (%)		
		Sawah	Ladang, huma, dll	Hutan rakyat
2012	11.197,01	14,37	6,70	5,46
2013	11.197,01	14,37	6,70	5,46
2014	11.197,01	14,37	6,70	5,46
2015	6777,52	14,37	6,70	5,46

(Sumber: UPTD Pertanian Tanaman Pangan, Potensi Desa diolah BPS)

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi pengurangan luas lahan pada tahun 2015. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kurangnya luas lahan tersebut didasarkan pada penggunaan lahan untuk proyek pemerintah berupa pembangunan waduk Jatigede. Sehingga, masyarakat yang selama ini bekerja dalam sektor pertanian akan sulit untuk berpindah mata pencaharian ke sektor lainnya seperti halnya pariwisata atau perdagangan mengingat membutuhkan waktu yang relatif lama untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru mereka. Dari hal ini lah dibutuhkan peran dari pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan cara menggali potensi yang ada seperti mengembangkan waduk Jatigede untuk pariwisata dan mengembangkan sektor perdagangan. Dari hal ini pula lah yang nanti akan menyebabkan terdapatnya perubahan mata pencaharaan masyarakat di Kecamatan Jatigede dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Jatigede berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 s/d 2015**

Tahun	Petani	Perkebunan	Pedagang	Buruh Peternak	Buruh Lepas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	6,092	75	49	3	225
2013	6,065	97	47	2	246
2014	6,082	72	49	8	221
2015	6,049	97	52	6	244

(Sumber: Buku Profil Kabupaten Sumedang 2012/2015)

Berdasarkan tabel di atas . menunjukkan bahwa hilangnya mata pencaharian masyarakat menyebabkan semakin berkurangnya petani dari tahun ke tahun yang berada di Kecamatan Jatigede. Sedangkan pada jenis pekerjaan yang lainnya seperti perkebunan mengalami kenaikan dari tahun ketahun walupun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Berbeda halnya pada jenis pekerjaan pedagang yang terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, sama halnya dengan jenis mata pencaharian peternakan. Sedangkan pada jenis pekerjaan buruh lepas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tanpa adanya penurunan yang terjadi.

Sehingga peneliti dapat mengetahui masalah utama dalam penelitian bahwa dari adanya pembangunan waduk yang secara tidak langsung telah menghilangkan lahan pertanian masyarakat padahal pertanian merupakan salah satu mata pencaharian pokok masyarakat sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Hilangnya mata pencaharian akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah petani dari tahun ketahun yang merada di Kecamatan Jatigede. Padahal pekerjaan sebagai petani merupakan ladang untuk mereka menyambung hidup demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan hilangnya lapangan pekerjaan mereka berupa lahan pertanian secara tidak langsung akan membawa dampak terhadap semakin meningkatnya jumlah pengangguran terselubung yang menyebabkan semakin bertambahnya jumlah angka kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah mengenai lapangan pekerjaan pengganti bagi para penduduk yang hilang mata pencahariannya. Karena akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan akan semakin menambah beban

pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas bahwa dimensi pertanian terjadi penurunan yang ditandai dengan adanya penurunan jumlah petani, hal ini terjadi karena tergenangnya lahan pertanian masyarakat sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Adapaun untuk sektor non pertanian akan mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu mengingat pembangunan waduk Jatigede akan menjadi potensi yang menguntungkan untuk sektor pariwisata maupun perdagangan.

Berdasarkan temuan awal penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang diformulasikan dalam judul penelitian **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan identifikasi masalah yang dianggap menarik untuk diteliti, antara lain adalah:

1. Berkurangnya lahan persawahan masyarakat yang disebabkan oleh pembangunan waduk Jatigede
2. Tidak adanya kejelasan kegiatan masyarakat ketika hilangnya mata pencaharian yang disebabkan oleh pembangunan waduk Jatigede



3. Hilangnya mata pencaharian menyebabkan semakin berkurangnya jumlah petani dari tahun ketahun yang merada di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
4. Meningkatnya jumlah pengangguran terselubung yang menyebabkan semakin bertambahnya jumlah angka kemiskinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang?
2. Seberapa besar pengaruh lingkungan kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti guna mengetahui dan mempelajari :

1. Untuk mengetahui pengaruh isi kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui pengaruh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan tentang pembangunan waduk Jatigede terhadap mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

##### **1 Secara teoritis**

- a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep sert teori-teori kebijakan publik khususnya terkait mata pencaharian.
- b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

## 2 Secara Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil studi kebijakan publik yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan waduk Jatigede
- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi Negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

## F. Kerangka Pemikiran

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public

Nicholas Henry (1988) dalam Pasolong (2013:7) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan social

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35-37) bahwa kebijakan publik adalah

*“public policy whatever that government choose to do or not to do.”* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sedangkan menurut David Eston dalam Anggara (2014:35-37), *“public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*. (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Bridgman dan Glyn Davis (2000) dalam Ismail (2009:8) adalah banyak definisi kebijakan publik yang menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan public. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari 5 karakteristik kebijakan public yaitu:

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai
2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya politis Bersifat dinamis.

Udoji dalam Wahab (2014:126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa:

*“ the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented”* (Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)

Pendekatan penulis lakukan dalam melandasi penelitian ini, dengan mengkaji beberapa teori, adapun teori yang menjadi dasar penelitian ini penulis ambil dari Mirelee S. Grindle dalam Subarsono (2015:93), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*).

1) Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- (1). Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- (4) Letak pengambilan keputusan
- (5) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2) Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- (3)Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (Subarsono,2015:93-94).

Selain dari teori Mirilee S. Grindle, sebagai dasar variabel X, penulis pun meruntut teori tentang mata pencaharian sebagai variabel Y dari Adon Nasrulloh Jamaludin yang mendefinisikan bahwa Implementasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh tarah hidup layak, dimana antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan keadaan penduduk dan demografinya.

Sedangkan mata pencaharian jika dilihat dari potensi yang dapat dikembangkan dari sebuah desa bergantung pada kondisi geografis, sosiologis, dan antropologis daerahnya. Dimana Jamaludin (2015:189-210) membagi potensi suatu wilayah berdasarkan pada variabel besar yang menjadi tolak ukur cara masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup.

**1) Beberapa macam mata pencaharian penduduk antara lain sebagai berikut :**

**a) Sektor Agraris (Pertanian)**

**(1) Sawah**

Bertani disawah merupakan mata pencaharian pokok petani di sebagian besar wilayah kita. Usaha pertanian sawah hanya dapat dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak, biasanya terdapat di daerah dataran rendah, padi merupakan jenis tanaman yang biasa ditanam di sawah. Beberapa jenis sistem pertanian padi sawah, adalah sebagai berikut.

**(2) Ladang**

Selain sawah, penduduk desa dapat berusaha tani di ladang. Perladangan biasanya dapat dilakukan di daerah-daerah yang persediaan airnya sangat kurang.

Perladangan merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan dengan cara berpindah-pindah (*nomaden*) untuk mencari lahan-lahan kosong yang bertanah subur. Lahan yang digunakan dalam perladangan biasanya merupakan lahan kering. Perladangan biasanya dilakukan penduduk dengan cara memabat pepohonan pada lahan yang ada di hutan dan kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman tertentu. Tanaman yang biasa ditanam diladang antara lain tanaman-tanaman palawija, padi huma, umbi-umbian, dan lainnya.

### **(3) Perkebunan**

Selain potensi pertanian lahan kering dan lahan basah, potensi lain yang dapat dikembangkan adalah usaha perkebunan. Usaha ini sangat cocok dilakukan untuk penduduk di pedesaan. Perkebunan adalah usaha yang dilakukan oleh petani yang bertempat tinggal di desa perkebunan. Tanaman yang ditanam pada perkebunan tidak terbatas pada tanaman pangan utama, namun juga berbagai jenis tanaman pangan tambahan semacam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya ditanam diperkebunan, misalnya kapas, kelapa sawit, tembakau, dan sebagainya. Perkebunan dapat dijalankan pada lahan yang sempit seperti pekarangan rumah maupun luas yang memerlukan modal besar.

### **(4) Perikanan**

Indonesia yang dua pertiga wilayahnya merupakan lautan yang memiliki potensi yang besar pada bidang perikanan. Selain di laut, pembudidayaan ikan dapat pula dilakukan dikolam ataupun di sawah.

## **(5) Peternakan**

Peternakan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam hewani. Usaha peternakan dilakukan secara perseorangan. Akan tetapi, peternakan telah menjadi usaha yang menguntungkan secara komersial apabila dikelola secara profesional. Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan.

### **b) Non Pertanian**

Non Pertanian merupakan suatu yang aktivitasnya di luar bidang pertanian, meliputi industri maritim, industri pariwisata, industri pertambangan dan energi, industri semen, industri perdagangan dan lain-lain. ([www.gurusejarah.com/2015/01/industri-nonpertanian-di.html](http://www.gurusejarah.com/2015/01/industri-nonpertanian-di.html) diakses pada 24-10-2016, 10:24)

### **1) Perindustrian**

Industri menurut Adon Nasrullah Jamaludin (2015:209) merupakan kegiatan yang sifatnya produktif komersial. Maksudnya, setiap pengolahan dalam industri memberikan nilai tambah terhadap bahan bakunya. Misalnya, tanaman gandum dapat diolah menjadi tepung, lalu diolah kembali menjadi roti. Industri yang dapat dikembangkan di pedesaan adalah industri kecil. Industri kecil ini adalah industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dan kebutuhan modalnya pun tidak terlalu besar.

### **2) Perdagangan**

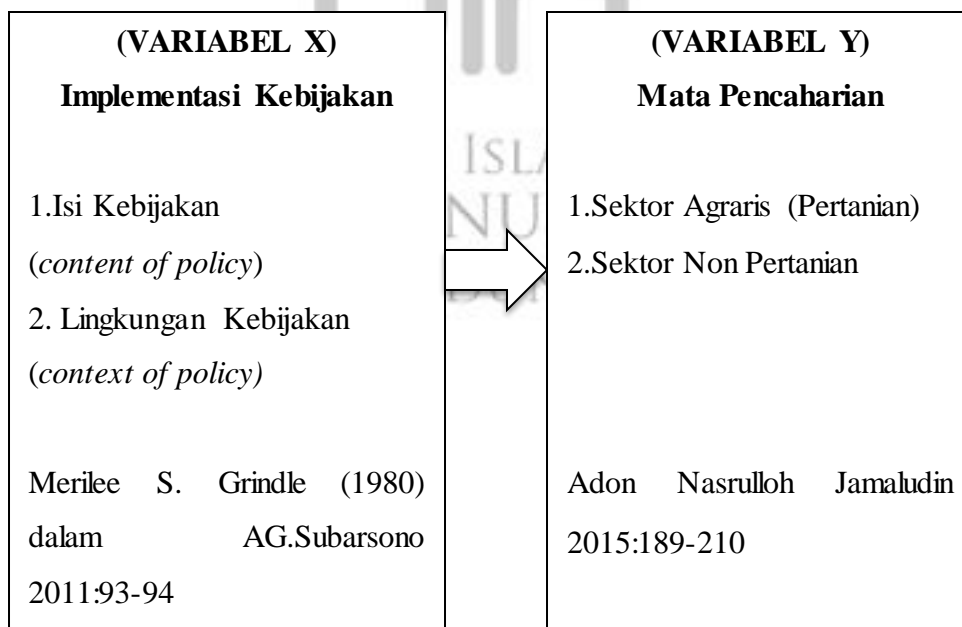
Dalam lingkup yang sangat sederhana, perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun



kelompok. Sebagai bentuk kegiatan ekonomi, perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Hal yang sering dilakukan oleh masyarakat perdesaan adalah perdagangan kecil. Perdagangan kecil merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung kepada pihak konsumen. Perdagangan merupakan kegiatan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen kepada konsumen. (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015: 187-210).

### 3) Pariwisata

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi. Mata pencaharian di sektor pariwisata beragam jenisnya, antara lain berupa penjualan jasa sebagai pemandu (*guide*), penyedia penginapan (akomodasi), hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata. Keindahan alam Indonesia sangat terkenal hingga ke berbagai negara. Namun, masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pariwisata.



*Sumber : Diolah oleh peneliti*

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**G. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2011:70) yang mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.”

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2011:77)

1.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_1$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ ) di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

$H_a$  : Ada pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_1$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ ) di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

2.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_2$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ ) di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

$H_a$  : Ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_2$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ ) di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

3.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_1$ ) dan lingkungan implementasi pembangunan waduk Jatigede ( $x_2$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ )

$H_a$  : Ada pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan pembangunan waduk Jatigede ( $x_1$ ) dan lingkungan implementasi pembangunan waduk Jatigede ( $x_2$ ) terhadap mata pencaharian ( $y$ )



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG